



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 8%**

Date: Friday, February 14, 2020

Statistics: 323 words Plagiarized / 4102 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

Exploring Indonesian Tax Ratio Development 1970-2010 I, Pendahuluan Selama empat puluh tahun terakhir ini, penerimaan pajak semakin diandalkan sebagai sumber penerimaan dalam negeri Indonesia. Hal ini dapat dilihat besarnya porsi penerimaan pajak dalam penerimaan dalam negeri. Peningkatan peranan penerimaan pajak, mulai terlihat sejak tahun 1986, beberapa tahun setelah reformasi pajak pada tahun 1984.

Saat ini sumbangan penerimaan pajak sudah lebih dari 70% PDN. Peranan tersebut adalah jauh lebih besar dibanding periode rejeki minyak (oil boom) pada periode 1970an dan awal 1980an. Meningkatnya peranan pajak dalam PDN menunjukkan bahwa penerimaan pajak, tumbuh lebih cepat dibanding dengan penerimaan dalam negeri.

Selain sumbangannya yang semakin besar, struktur penerimaan pajak juga semakin kuat. Hal ini dilihat dari semakin membesarnya peranan penerimaan pajak langsung terutama pajak penghasilan (PPh) memasuki periode akhir 1990an dan terus berlanjut sampai saat ini. Namun sekalipun peranan penerimaan pajak sudah semakin besar, namun angka rasio pajak Indonesia masih sangat rendah.

Pada tahun 2011, angka rasio pajak adalah 11,2% yang artinya hanya 11,2% output agregat yang dapat ditarik sebagai pajak. Angka ini relatif sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain, seperti Malaysia (15,1%), Korea Selatan

(19%) dan Cina (16%). Selama empat puluh terakhir, angka rasio hanya naik dua kali lipat.

Lambannya pertumbuhan rasio pajak ini menimbulkan pertanyaan faktor-faktor apa penyebabnya dan apa dampaknya bagi kinerja ekonomi makro Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, studi ini menggunakan analisis deskriptif dan ekonometrika. Ruang lingkup studi ini adalah analisis tingkat nasional yang mencakup rentang waktu empat puluh tahun (1970-2010).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sumber utama datanya adalah Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. II, Telaah Teoritis 2.1. Pajak Dalam Perekonomian Modern Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber penghasilan pemerintah dan instrumen kebijakan ekonomi yang pada prinsipnya bertujuan memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi. Pajak amat dibutuhkan untuk mengoreksi kegagalan pasar, yaitu melalui koerksi terhadap eksternalitas yang merugikan (external cost).

Di sisi lain pajak dapat memaksa individu untuk mau bekerja lebih lama sehingga menstimulir produksi agregat (Stiglitz, 2000; Rosen, 2008 dan Musgrave, 1989). Bahkan pajak dapat digunakan untuk memperbaiki keadilan, yang mencakup keadilan berdasarkan azas manfaat (benefit principles) maupun azas kemampuan membayar (ability to pay principles). Pajak juga sebagai alat redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi (Stiglitz, 2000; Mankiw 2003).

Fungsi dan peran pajak seperti yang telah diuraikan di atas, menyebabkan kinerja pajak amat menentukan kinerja perekonomian dalam kerangka memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial (social welfare). Purohit berpandangan bahwa kinerja pajak merupakan bagian integral dari kinerja penerimaan negara. "Revenue performance indicates the relative changes in yield from tax and non tax revenue of national or subnational government.

It takes account the changes in rates, base, and coverage related to the structure of revenue resources. It also incorporated issues related to efficiency in governance of tax and non tax sources." Purohit (2008) Definisi di atas menunjukkan bahwa analisis kinerja penerimaan negara amat penting karena menggambarkan seberapa efektif dan efisien pengelolaan sumber-sumber penerimaan pemerintah. Analisis kinerja penerimaan mencakup kinerja penerimaan pajak dan non pajak.

Mengingat peranan pajak pada saat perekonomian semakin maju adalah semakin besar, maka analisis kinerja pajak amat penting. Beberapa ukuran atau indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pajak adalah penerimaan pajak (tax revenue), rasio pajak (tax ratio), daya cakupan pajak (tax coverage) dan struktur penerimaan pajak (tax revenue structure).

Nilai penerimaan pajak (tax ratio) diukur dengan nilai nominal dan nilai riil penerimaan pajak. Meningkatnya penerimaan nominal pajak, dapat saja menunjukkan membaiknya kinerja pajak. Namun agar lebih akurat, maka evaluasi kinerja pajak, lebih baik menggunakan penerimaan pajak riil, yaitu penerimaan pajak nominal yang dideflasi dengan indeks harga umum, misalnya deflator PDB. Rasio pajak (tax ratio) adalah angka yang menunjukkan berapa persen output agregat (PDB) yang ditarik sebagai pajak.

Umumnya rasio pajak diukur dengan membandingkan nilai penerimaan pajak nominal dengan PDB harga berlaku. Bila angka rasio pajak membesar maka porsi output agregat yang ditarik sebagai pajak adalah semakin besar. Daya cakupan pajak (tax coverage) menunjukkan besarnya rasio potensi penerimaan pajak dengan penerimaan pajak aktual.

Bila angka tax coverage makin besar maka maknanya porsi potensi pajak yang dapat direalisasikan makin besar. Secara teoritis angka tax coverage maksimal adalah satu, yang maknanya seluruh potensi pajak berhasil direalisasikan. Struktur pajak (tax structure) memberi gambaran tentang porsi penerimaan pajak langsung (direct tax) dengan pajak tidak langsung (indirect tax).

Struktur penerimaan pajak dikatakan tidak berimbang, bila penerimaan pajak terlalu didominasi oleh pajak tidak langsung. Secara teoritis, pajak tidak langsung akan lebih mudah dipungut dibanding dengan pajak langsung. Namun pemungutan pajak tidak langsung menimbulkan persoalan inefisiensi yang terwujud dalam bentuk excess burden atau dead weight loss dan atau tax incidence (Musgrave and Musgrave, 1989). 2.2.Rasio Pajak : Konsep Dan Makna Telah disampaikan bahwa rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan nominal pajak dengan produk domestik bruto (PDB).

Jika rasio pajak makin besar, maka porsi output agregat yang dikenakan pajak akan semakin besar. Bila rasio pajak meningkat maka pertumbuhan penerimaan pajak lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menunjukkan dua hal, yaitu meningkatnya potensi penerimaan pajak dan atau meningkatnya efisiensi pengelolaan sumber-sumber penerimaan pajak.

Meningkatnya angka rasio pajak, bermakna semakin besarnya kemampuan sektor publik untuk menjalankan fungsi-fungsi alokasi (allocation), distribusi (distribution) dan stabilisasi (stabilization) dan regulasi (regulation), yang bukan saja menstimulir pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial (Musgrave, 1989).

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bila rasio pajak makin besar, maka dampaknya bagi perekonomian makin baik? Stiglitz (2000), menggunakan rasio pajak sebagai salah satu ukuran besarnya sektor publik (public sector scale). Menurutnya membesarnya skala publik pada awalnya akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disebabkan membesarnya skala sektor publik meningkatkan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi-fungsi sektor publik, seperti yang telah disampaikan Musgrave (1989). Namun jika skala publik menjadi sangat besar, maka sektor publik berubah menjadi beban sosial, sehingga justru sangat kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Scully(2003) berpendapat bahwa peningkatan skala sektor publik akan memperbaiki kinerja ekonomi makro, "Arguments that increased size of public sector is beneficial and may promote growth and efficiency briefly would be of the following sort.(1)The larger the government sector the greater macroeconomic stability, since the government expenditures exhibit less variance than private sector expenditures.

Ceteris paribus, economies with low variance in GNP grow at a higher rate than those with a high variance in GNP.(2)The larger size of government, the greater is the scope for income redistribution. Too much income inequality may create incentives for the low income types to seek another social order.

Redistribution may reduce work incentives, but may be an inexpensive (efficient) means of preserving the social order. Satisfying the demand for income redistribution promote political and social stability, which are preconditions for growth and efficiency. Thus, the income distribution policy may reflect the opportunity cost of rebellion.(3)Traditional public goods-externalities (market failures) arguments and the effect of reduced transaction cost are associated with the government supplied infrastructure.(4) In a less developed country context a belief that the private sector is incapable of modern transformation of the economy."(Scully,2003, page 3).

Ekonom yang mencoba melihat hubungan antara rasio pajak dengan pertumbuhan ekonomi adalah Laffer. Dalam pandangannya, awalnya peningkatan rasio pajak akan menstimulir pertumbuhan ekonomi. Namun jika rasio pajak terlalu tinggi, maka pertumbuhan ekonomi justru akan menurun (Miles and Cott, 2005; Ulbirsch, 1989).

Konfirmasi empiris tentang hubungan antara rasio pajak dengan pertumbuhan ekonomi amat beragam dan masih tetap menjadi perdebatan. Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kemajuan ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek sejarah perekonomian (Mikesell, 1999; Bird and Oldman, 1990). 2.3.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Rasio Pajak Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kinerja pajak, adalah faktor internal perekonomian, faktor eksternal perekonomian dan efisiensi sistem pemungutan pajak. Faktor Internal Perekonomian Faktor-faktor internal adalah faktor-faktor berada di bawah kemampuan kontrol manajemen pemerintahan.

Faktor-faktor internal inilah yang memberikan gambaran tentang potensi penerimaan pajak. Ada beberapa indikator utama yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian potensi penerimaan pajak (tax generating capacity), yaitu, pendapatan per kapita atau output agregat per kapita, struktur produksi, struktur kesempatan kerja, tingkat keterbukaan ekonomi, porsi penduduk perkotaan (Todaro, 2003; Purohit, 2008).

Faktor lain yang dapat dikelompokkan dalam kategori internal perekonomian adalah basis pajak (tax base). Salah satu definisi dari basis pajak (tax bases) adalah seperti yang disampaikan Rosen (2003), yaitu item-item dan atau aktivitas-aktivitas yang dapat dikenakan pajak (The item or the activity that is to be taxed).

Item-item yang dimaksud antara lain adalah kekayaan, penghasilan, sedangkan aktivitas yang dapat dikenakan pajak antara lain adalah konsumsi dan produksi. Semakin banyak dan bervariasi basis pajak maka potensi penerimaan pajak makin besar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah dan variasi basis pajak, yaitu tingkat kemajuan ekonomi dan aspek politik.

Jika perekonomian semakin berkembang maka kegiatan ekonomi akan semakin terkonsentrasi di sektor modern, yaitu industri dan jasa. Dalam arti output ekonomi dan kesempatan kerja terkonsentrasi di sektor modern. Pada saat yang

sama umumnya aktivitas perekonomian juga akan semakin terkonsentrasi di perkotaan.

Perkembangan-perkembangan tersebut akan memperluas dan memperbesar basis pajak karena bertambahnya obyek pajak dan subyek pajak. Faktor Eksternal Perekonomian Faktor-faktor eksternal perekonomian adalah faktor-faktor yang berada diluar kemampuan kontrol manajemen pemerintahan. Faktor-faktor eksternal dapat berupa perkembangan ekonomi inetransional atau kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah-pemerintah negara-negara maju.

Perkembangan ekonomi internasional seperti pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan atau negara-negara pesaing, kemajuan teknologi dan perkembangan-perkembangan harga dunia untuk komoditi strategis dapat mempengaruhi kinerja pajak pemerintah pusat. Misalnya, resesi ekonomi dunia, dapat menurunkan ekspor sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.dan akhirnya menurunkan penerimaan pajak.

Kebijakan ekonomi negara-negara maju juga dapat mempengaruhi kinerja pajak pemerintah, melalui pengaruhnya kepada kinerja ekonomi makro. Misalkan kebijakan protektif oleh pemerintah negara-negara maju, dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi NSB karena menurunnya ekspor. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini akan menurunkan kinerja pajak.

Kejutan-kejutan eksternal (external shock) juga dapat mempengaruhi kinerja pajak melalui pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi makro. Misalkan, kenaikan harga energi yang tinggi dan mendadak akan mempengaruhi secara negatif penawaran agregat. Hal ini dapat membawa perekonomian domestik ke dalam kondisi resesi.

Efisiensi Sistem Perpajakan Efisiensi sistem pajak menunjukkan berapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Efisiensi pajak juga mengacu kepada pengertian bahwa dampak negatif dari pemungutan pajak dapat ditekan seminimum mungkin, sementara dampak positif dapat dimaksimalkan. Efisiensi sistem pajak sangat ditentukan oleh efisiensi sistem administrasi pajak.

Kebijakan pajak tidak akan meningkatkan kinerja pajak tanpa disertai daya dukung administrasi pajak. Sistem perpajakan dikatakan makin efisien bila dengan sumber daya yang sama atau biaya pemungutan yang sama, pajak yang berhasil dikumpulkan semakin besar. Atau untuk mencapai target pemungutan pajak yang

sama dibutuhkan biaya pemungutan (pengorbanan sumber daya) yang lebih kecil. .

Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingkat efisiensi sistem pemungutan pajak, yaitu kuantitas dan kualitas aparatur pajak (fiskus), institusi dan sistem pemungutan pajak (sentralistis atau desentralistis) dan reformasi pajak. Perbaikan kuantitas dan kualitas fiskus dapat memperbaiki efisiensi pemungutan pajak. Namun aparatur pajak yang cakap sekalipun umumnya lebih mengkonsentrasikan diri pada efisiensi teknis pemungutan pajak.

Untuk memperbaiki efisiensi ekonomi pemungutan pajak, dibutuhkan perbaikan atau penataan kelembagaan (institusi). Definisi yang paling sederhana dari institusi adalah seperangkat aturan atau tata nilai baku yang disepakati untuk ditaati, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kolektif.

Institusi yang paling menentukan dalam sistem perpajakan adalah institusi politik (political institution), yaitu aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang secara umum diterima untuk memutuskan apa yang harus pemerintah lakukan dan bagaimana pemerintah membiayainya. Contoh lembaga politik dalam kehidupan sehari-hari adalah suara mayoritas (majority rule) dan pemerintah yang berkuasa (representative government).

Sentralisasi dan desentralisasi juga dipercaya dapat mempengaruhi kinerja pajak. Mana yang lebih baik antara sistem sentralisasi atau desentralisasi masih tetap menjadi perdebatan. Salah satu alasan, kelompok yang mendukung desentralisasi pajak adalah bahwa dengan desentralisasi, semakin banyak objek-objek pajak yang lepas dari garapan pemerintah pusat, dapat digarap oleh pemerintah daerah.

Karena itu desentralisasi pajak tidak akan menimbulkan tumpang tindih pemungutan, selama sistem pemungutan pajak masih belum efisien atau belum mampu menggarap sebagian besar potensi pajak. Upaya yang paling umum dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan adalah reformasi pajak (tax reform). reformasi pajak pada prinsipnya adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak melalui penyederhanaan sistem pajak (Mikesell, 1999; .Stotsky (1995) mengakui bahwa reformasi pajak pelaksanaannya sangat kompleks dan berat, karena berkaitan dengan berbagai kekuatan politik dan ekonomi.

Namun reformasi pajak dibutuhkan dan harus dilakukan bila ternyata sistem pajak menyebabkan inefisiensi, ketidakadilan dan maraknya kejahatan-kejahatan pajak (Stern, 1990; Rosen, 2003; Stiglitz, 2000). III, Perkembangan Rasio Pajak Indonesia dan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhinya 3.1. Perkembangan Rasio Pajak Grafik 1 di bawah ini menunjukkan perkembangan rasio pajak setiap tahun selama periode 1970-2010.

Sedangkan Tabel 2 di bawah ini memberikan gambaran statistic deskriptif angka rasio pajak Indonesia, selama periode 1970-2010 maupun selama interval waktu pengamatan yang lebih singkat, yaitu satu dasawarsa. Grafik 1 Perkembangan Rasio Pajak Indonesia 1970-2010 (% Produk Domestik Bruto Harga Berlaku) Tabel 2 Statistik Deskriptif Angka Rasio Pajak Indonesia 1970-2010

1970-1980  
1981-1990  
1991-2000  
2001-2010  
1970-2010

Rata-Rata

7,2  
7,5  
9,9  
12,2  
9,1

Median

7,4  
7,3  
10,7  
12,4  
8,7

Maksimum

8,1  
11,2  
11,1  
13,3  
13,3

Minimum



6,4  
5,3  
7,3  
10,7  
5,3

Std. Dev.

0,5  
2,0  
1,4  
0,8  
2,4

Distans

1,7  
5,9  
3,8  
3,1  
8,0

Sumber: Diolah dari data BPS berbagai tahun Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa selama empat puluh tahun terakhir, angka rasio pajak Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat, Setelah mengalami masa rendahnya dan stagnannya angka rasio pajak selama hampir dua puluh tahun, maka pada tahun 1989 rasio pajak Indonesia untuk pertama kalinya mencapai angka 10% PDB harga berlaku, Sejak itu rasio pajak Indonesia senantiasa lebih tinggi dari 10% PDB harga berlaku, namun sampai saat ini belum mampu mencapai angka 15% PDB harga berlaku, Selama periode 1970-2010, angka rasio pajak terendah terjadi pada tahun 1983 dan 1984 yaitu hanya sekitar 5,8% dan 5,3% PDB harga berlaku, Sementara itu angka rasio pajak tertinggi tercapai pada tahun 2008 yaitu 13,3%, Tetapi tahun-tahun selanjutnya angka rasio pajak terus menurun, Pada tahun 2010 angka rasio pajak adalah 11,2% yang lebih rendah dari angka rasio pajak tahun 2002 yaitu 11,6%, Selama periode 1970-2010 rasio pajak rata-rata adalah 9,1% dan median adalah 8,7%, Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur termasuk Cina yang adalah negara komunis dan sentralistik, Rendahnya rasio pajak pada periode 1970an - pertengahan 1980an lebih disebabkan oleh lalainya pemerintah menggarap potensi penerimaan pajak nasional, Kelalaian tersebut

berkaitan dengan meningkat cepatnya penerimaan minyak dan gas, yang sampai pertengahan 1980an mendominasi sumber penerimaan dalam negeri (PDN), Turun tajamnya harga minyak dunia memasuki tahun 1982 yang seiring dengan resesi dunia, telah menyadarkan pemerintah untuk kembali menggarap potensi pajak dalam negeri, Langkah yang paling terkenal dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak adalah reformasi pajak tahun 1984, Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, reformasi pajak telah mulai membuahkan hasil, Pada tahun 1986 rasio pajak untuk pertama kalinya mencapai 8% PDB harga berlaku, yang kemudian meningkat menjadi 10% PDB harga berlaku pada tahun 1989, Sampai tahun 1996 sebelum terjadinya krisis ekonomi angka rasio pajak senantiasa lebih tinggi dari 10% PDB harga berlaku, Namun krisis ekonomi 1997-1999 yang bersamaan dengan Krisis Asia Timur 1997 telah menurunkan rasio pajak menjadi lebih rendah dari 10% PDB harga berlaku selama tahun 1998-2000, Memasuki periode desentralisasi fiskal (2001) rasio pajak meningkat kembali menjadi lebih tinggi dari 10% PDB harga berlaku, Pada tahun 2003 rasio pajak mampu mencapai angka 12,4% PDB harga berlaku dan terus meningkat sampai tahun 2008, Namun sejak tahun 2009 angka rasio pajak menurun kembali.

Sebenarnya, memasuki periode desentralisasi fiskal, khususnya sejak tahun 2004 pemerintah yang berkuasa saat ini, terus melakukan beberapa langkah-langkah adalah reformasi pajak. Bila reformasi pajak tahun 1984 menekankan pada sisi penyederhanaan sistem perpajakan (Usman, 2009), maka reformasi pajak periode tahun 2004 dan seterusnya lebih bersifat pada perbaikan sistem administrasi dan pencitraan (Purnomo, 2009).

Namun lambannya peningkatan angka rasio pajak selama periode 2004-2008 dan menurunnya angka rasio pajak selama tahun 2009-2010 telah menimbulkan pertanyaan dan perdebatan akan efektivitas pelaksanaan reformasi pajak. Secara keseluruhan, selama periode 1970-2010, angka rasio pajak Indonesia sangat fluktuatif. Misalnya jarak antara angka tertinggi dengan terendah (distans) adalah 8 yang sekitar 3,4 kali lipat angka deviasi standar.

Bila mengamati pada periode-periode yang lebih singkat, yaitu 1970-1980; 1981-1990; 1991-2000 dan 2001-2010 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2 di atas maka dapat disimpulkan bahwa periode 1991-2000 adalah periode dimana angka rasio pajaknya paling tidak fluktuatif. Sementara itu periode lainnya yaitu 1970-1980, 1981-1990 dan 2001-2010 tingkat fluktuasinya hampir sama dengan tingkat fluktuasi periode 1970-2010.

### 3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Angka Rasio Pajak

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan rasio pajak dilakukan dengan menggunakan hasil estimasi

persamaan di bawah ini. LRP

$$\begin{aligned} &= \\ &-0.47 \\ &+0.69\text{LRP}-1 \\ &+0.14\text{LYRC} \\ &-0.20\text{R84} \\ &-0.34\text{K98} \\ &-0.04\text{OR} \end{aligned}$$

Statistik t

-0.90  
6.29  
1.72  
-1.81  
-3.13  
0.68

Probabilita (%)

37,5  
0,00  
9,45  
8,0  
0,36  
50,02

R<sup>2</sup>/ Adj.R<sup>2</sup> (%)

86,7/84,7

Statistik F

43,2

Statistik DW  
2,02

Hasil estimasi menunjukkan bahwa angka rasio pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel-variabel rasio pajak satu tahun sebelumnya, PDB riil per kapita, kebijakan reformasi pajak 1984 dan krisis ekonomi 1998.

Sementara itu selama rasio pajak selama periode reformasi (1999 sampai 2010) tidak berbeda signifikan dengan periode sebelumnya. Bila angka rasio pajak pada suatu periode tumbuh 1%, maka rasio pajak setahun kemudian angka meningkat sebesar 0,69%. Angka rasio pajak tidak sensitif (inelastis) terhadap pertumbuhan ekonomi (pendapatan riil perkapita).

Sebab bila pendapatan per kapita tumbuh 1% maka angka rasio pajak tumbuh hanya 0,14%. Tidak sensitifnya rasio pajak terhadap pertumbuhan ekonomi tidaklah berarti pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, tetapi kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak (nominal) lebih lambat dari kecepatan pertumbuhan output atau nilai output agregat.

Relatif lambanya pertumbuhan penerimaan pajak dibanding dengan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan masih belum efisien dan efektifnya pengelolaan perpajakan nasional. Hasil estimasi menunjukkan bahwa reformasi pajak tahun 1984 justru menurunkan rasio pajak sebesar 0,21%. Dampak reformasi pajak 1984 terhadap penerimaan pajak memang merupakan perdebatan menarik.

Beberapa studi menunjukkan bahwa reformasi pajak 1984 berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan studi-studi lain menunjukkan bahwa reformasi pajak justru menurunkan penerimaan pajak. Sekalipun reformasi pajak 1984 berhasil menaikkan penerimaan pajak, namun bila kenaikan penerimaan pajak masih relatif lebih rendah dibanding dengan laju inflasi, maka rasio pajak akan menurun.

Selanjutnya hasil studi menunjukkan bahwa pada saat krisis ekonomi 1998, angka rasio pajak adalah 0,34% lebih rendah dibanding dengan periode sebelum dan setelah tahun 1998. Data menunjukkan bahwa pada tahun 1998 penerimaan nominal pajak masih tumbuh sebesar 13% per tahun. Namun laju inflasi 1998 yang mencapai 85% per tahun, menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak secara riil adalah -72%/tahun.

Tingginya laju inflasi tahun 1998 juga menyebabkan nilai pajak riil sampai tahun 2001 masih terus menurun, sebab nilai akumulatif kenaikan pajak nominal selama periode 1999-2001 masih lebih rendah dari laju inflasi tahun 1998. Menurunnya penerimaan pajak pada saat krisis ekonomi 1998, juga dapat dihubungkan dengan fakta terkontraksinya perekonomian Indonesia sebesar hampir 14%.

Artinya pada tahun 1998 kuantitas output agregat Indonesia sekitar 14% lebih rendah dibanding dengan tahun 1997. Namun rendahnya dampak kontraksi rasio pajak pada saat Krisis Ekonomi 1998 menyiratkan bahwa penerimaan pajak tidak sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama periode otonomi daerah, ternyata rasio pajak tidak mengalami peningkatan atau perubahan yang signifikan.

Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan harapan yang digantungkan dari pelaksanaan desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal. Gagalnya desentralisasi fiskal untuk memperbaiki kinerja pajak, lebih disebabkan penekanan pada desentralisasi sisi pengeluaran, seperti yang tercermin pada pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pemberian dana transfer yang bersifat block grant, tadinya diharapkan meningkatkan keleluasaan pemerintah daerah untuk menggunakan dana transfer sehingga dapat menstimulir atau mempercepat pembangunan daerah terutama pada wilayah kabupaten/kota. Namun dalam praktiknya selama satu dasawarsa pertama ini, DAU justru menumbuhkan ketergantungan fiskal yang baru. Daerah enggan untuk menggarap potensi pajaknya.

Fenomena lain yang terjadi selama periode otonomi daerah, adalah sangat banyaknya pembentukan provinsi dan kabupaten/kota yang baru. Banyak pengamat berpendapat bahwa keinginan membentuk provinsi dan kabupaten/kota tersebut adalah orientasi kekuasaan yang sarat dengan moral hazard dan perilaku memburu rente (rent seeker). IV.

Rasio Pajak Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hubungan antara rasio pajak dengan pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan dalam hasil estimasi di bawah ini. YR

=

184.858

+0,94YR-1

-44.345Taxratio

+3.660Taxratio2

Statistik t

1,64

-1,75

2,56

44,3

Probabilita (%)

11,0

8,9

1,5

0,00

R2/ Adj.R2

99,6/99,6

Statistik F

2.923,3

Statistik DW

1,81

Hasil estimasi menunjukkan tingkat output (PDB riil) pada suatu periode

berhubungan dipengaruhi secara signifikan dengan arah positif oleh tingkat output pada satu periode kemudian akan bertambah sebanyak 0,94 unit.

Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan rasio pajak adalah non linier. Awalnya peningkatan angka rasio pajak akan bersifat kontraktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun bila sudah mencapai tingkat rasio pajak tertentu, maka peningkatan angka rasio pajak justru akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Besarnya angka rasio pajak yang mulai mendorong pertumbuhan ekonomi, dapat diturunkan dengan analisis matematik secara sederhana, seperti diuraikan berikut ini.  $YR = 184.858 + 0,94YR-1 - 44.345Taxratio + 3.660Taxratio^2$  ( $YR/?Taxratio = 44.345 - 7.320 Taxratio$  Secara matematis titik balik akan tercapai bila, ( $YR/?Taxratio = 0$  Atau  $-7.320 Taxratio = 44,345$   $Taxratio = 6,1\%$  Angka titik balik untuk tax ratio yang sebesar 6,1% bermakna bahwa ketika rasio pajak terus meningkat sampai angka 6,1% maka kenaikan tersebut akan menurunkan PDB riil.

Tetapi bila angka rasio pajak terus ditingkatkan menjadi lebih tinggi, maka peningkatan rasio pajak justru akan menstimulir pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis hasil estimasi tersebut dapat dijelaskan dan diterima. Penjelasan pertama adalah pada saat rasio pajak ditingkatkan, individu dalam perekonomian dipaksa untuk bekerja lebih keras untuk dapat bertahan dan meningkatkan pendapatannya.

Sebab rasio pajak yang begitu rendah akan menyebabkan individu malas bekerja, karena pendapatan disposabel akan semakin besar, sementara itu harga barang/jasa umumnya akan menjadi lebih murah. Dengan demikian pendapatan riil pada saat pendapatan per kapita masih sangat rendah, justru sudah tinggi. Penjelasan kedua, adalah pada saat rasio pajak masih sangat rendah, kemampuan pemerintah melakukan provisi barang/jasa publik akan sangat rendah.

Hal ini menyebabkan kemampuan sektor publik untuk menghasilkan dan menyebarkan eksternalitas yang positif juga akan sangat terbatas. Akibat selanjutnya sektor publik kurang mampu menstimulir sisi permintaan dan penawaran agregat maupun interaksi keduanya. Rasio pajak yang terlalu rendah juga di sisi lain menyebabkan kemampuan sektor publik untuk menjaga stabilitas ekonomi makro maupun redistribusi pendapatan akan menjadi sangat rendah, tidak efisien dan tidak efektif.

Penjelasan ketiga, pada saat rasio pajak masih sangat rendah, umumnya skala perekonomian juga masih sangat kecil dan struktur produksi maupun

pengeluaran agregat tidak berimbang. Struktur produksi masih didominasi oleh sektor pertanian, sementara struktur pengeluaran agregat didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Peningkatan rasio pajak menyebabkan transfer sumber daya dari rumah tangga dan perusahaan ke sektor publik, untuk sementara waktu akan menurunkan kemampuan produksi **dan konsumsi, sehingga menurunkan tingkat output agregat keseimbangan.**

Namun, bila penerimaan pajak dikelola dengan baik dan efisien maka secara bertahap kapasitas produksi akan meningkat melalui peningkatan kualitas SDM maupun peningkatan **jumlah dan kualitas infrastruktur seperti jalan raya, listrik, air bersih, pelabuhan laut dan pelabuhan udara.** Penjelasan keempat, **rasio pajak Indonesia yang** sampai tahun 2010 masih kurang dari 15% PDB harga berlaku, adalah memang masih terlalu rendah dibanding dengan pengalaman negara-negara maju, yang menunjukkan bahwa rasio pajak yang optimal untuk menstimulir pertumbuhan ekonomi adalah antara 23%-34% PDB.

Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa peningkatan rasio pajak untuk konteks Indonesia saat ini, tidak perlu ditakutkan karena justru akan menstimulir pertumbuhan ekonomi. V. Penutup  
Sekalipun studi ini masih sangat sederhana dan menggunakan peralatan analisis, namun telah membawa kepada beberapa kesimpulan-kesimpulan penting. 1. Angka rasio pajak Indonesia selama 40 tahun terakhir ini, pertumbuhannya relatif lambat.

Dalam waktu hampir dua generasi, angka rasio pajak hanya meningkat dua kali lipat. Sementara itu selama dua tahun terakhir angka rasio pajak kembali mengalami penurunan. 2. Perkembangan angka rasio pajak, tidak sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi, kebijakan dan atau perkembangan politik maupun gangguan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kemungkinan tidak memiliki hubungan fungsional yang kuat dan logis dengan perkembangan-perkembangan variabel ekonomi makro, khususnya pertumbuhan ekonomi. ` 3. Pemerintah tidak perlu lagi, kendatipun harus hati-hati dan cermat untuk meningkatkan angka rasio pajak.

Karena rasio pajak saat ini, memang masih terlalu rendah untuk dapat mendorong peningkatan efisiensi dan menstimulir pertumbuhan ekonomi. **Kepustakaan**  
**Amacher, Ryan A, Holley H. Ulbrich** (1989), Principles of Macroeconomics 4th Edition, South-Western Publishing CO Mikesell, John (1999), Fiscal Administration: Analysis and Applications for The public Sectors 5th Edition, Thomson Wadsworth Miles, David, Andrew Scott (2005), Macroeconomics: Understanding The Wealth of Nations, John Willey and Sons Nasution, Darmin (2009), Substansi Perubahan UU



Perpajakan 2008 dalam Abimanyu, Anggito and Andie Megantara (2009), Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, Dan Implementasi, Halaman 197-218  
 Purnomo, Hadi (2009), Reformasi Administrasi Perpajakan Tahun 2003 dalam Abimanyu, Anggito and Andie Megantara (2009), Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, Dan Implementasi, Halaman 181-196  
 Scully, Gerald W (1989), **The Size of The State, Economic Growth and The** Efficient Utilization of National Resources, Public Choice Journal, November 1989,63,2, page 149-196  
 Stiglitz, Joseph E (2000), Economics of The Public Sector 3rd edition, New York: W.W.Norton & Company  
 Usman, Marzuki (2009), Reformasi Fiskal dan Finansial Indonesia Dalam Dekade 1970-an dan 1980-an dalam Abimanyu, Anggito and Andie Megantara (2009), Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, Dan Implementasi, Halaman 47-57

#### INTERNET SOURCES:

---

- <1% - [www.kompasiana.com/niftakulisnaini/584acbf1af7e...](http://www.kompasiana.com/niftakulisnaini/584acbf1af7e...)
- <1% - [inspirasitabloid.wordpress.com/2010/08/30/glob...](http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/08/30/glob...)
- <1% - [majalahpajak.net/problematika-pajak-di-balik...](http://majalahpajak.net/problematika-pajak-di-balik...)
- <1% - [finance.detik.com/moneter/d-3421626/kenapa-dana...](http://finance.detik.com/moneter/d-3421626/kenapa-dana...)
- <1% - [imammukhlis.files.wordpress.com/2012/01/pajak...](http://imammukhlis.files.wordpress.com/2012/01/pajak...)
- <1% - [repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/55394...](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/55394...)
- <1% - [indeksprestasi.blogspot.com/2011/03/tesis-faktor...](http://indeksprestasi.blogspot.com/2011/03/tesis-faktor...)
- <1% - [mafiadoc.com/brian-serjana-hukumpdf-jurnal...](http://mafiadoc.com/brian-serjana-hukumpdf-jurnal...)
- <1% - [core.ac.uk/display/21568007](http://core.ac.uk/display/21568007)
- <1% - [www.slideshare.net/mulyadiyusuf56/kebijakan...](http://www.slideshare.net/mulyadiyusuf56/kebijakan...)
- <1% - [shareefaunique.blogspot.com/2010/05/indikator...](http://shareefaunique.blogspot.com/2010/05/indikator...)
- <1% - [www.cnbcindonesia.com/market/20180820080449-17...](http://www.cnbcindonesia.com/market/20180820080449-17...)
- <1% - [id.scribd.com/doc/288135753/Dwi-Woro...](http://id.scribd.com/doc/288135753/Dwi-Woro...)
- <1% - [core.ac.uk/download/pdf/11735419.pdf](http://core.ac.uk/download/pdf/11735419.pdf)
- <1% - **and may promote growth and efficiency briefly would be of the following sort.** 1 the
- <1% - [www.fte.org/.../lesson-1-opportunity-cost](http://www.fte.org/.../lesson-1-opportunity-cost)
- <1% - **ekonomi yang mencoba melihat hubungan antara rasio pajak dengan pertumbuhan ekonomi adalah** laffer.
- <1% - [marshaliakifujin.blogspot.com/2015/11/potensi...](http://marshaliakifujin.blogspot.com/2015/11/potensi...)
- <1% - [pt.scribd.com/doc/278055640/20353280-S45678...](http://pt.scribd.com/doc/278055640/20353280-S45678...)
- <1% - [www.slideshare.net/phikanetizens/biaya-overhead...](http://www.slideshare.net/phikanetizens/biaya-overhead...)
- <1% - [www.researchgate.net/publication/312217582...](http://www.researchgate.net/publication/312217582...)
- <1% - [www.researchgate.net/publication/327151686\\_ALIH...](http://www.researchgate.net/publication/327151686_ALIH...)

<1% - [www.slideshare.net/AhmadKamarudin2/modul-ii...](http://www.slideshare.net/AhmadKamarudin2/modul-ii...)  
<1% - [negerisiapa.blogspot.com/2017/01/kepatuhan-wajib...](http://negerisiapa.blogspot.com/2017/01/kepatuhan-wajib...)  
<1% - [www.gurupendidikan.co.id/sistem-perpajakan-indonesia](http://www.gurupendidikan.co.id/sistem-perpajakan-indonesia)  
<1% - [repository.unpas.ac.id/14584/3/BAB 1.pdf](http://repository.unpas.ac.id/14584/3/BAB%201.pdf)  
<1% - [variyaka.wordpress.com/gado-gado](http://variyaka.wordpress.com/gado-gado)  
<1% - [www.slideshare.net/rossyrfazri/penggunaan...](http://www.slideshare.net/rossyrfazri/penggunaan...)  
<1% - [text-id.123dok.com/document/nzwvd51q-analisis...](http://text-id.123dok.com/document/nzwvd51q-analisis...)  
<1% - [www.researchgate.net/publication/308650586...](http://www.researchgate.net/publication/308650586...)  
<1% - [www.researchgate.net/publication/324952536...](http://www.researchgate.net/publication/324952536...)  
<1% - [ekonomi.bisnis.com/read/20191014/12/1158941/...](http://ekonomi.bisnis.com/read/20191014/12/1158941/...)  
<1% - [bukharawrite.wordpress.com/2015/04/09/analisis...](http://bukharawrite.wordpress.com/2015/04/09/analisis...)  
<1% - [www.slideshare.net/masyrifahoo/jazmedia...](http://www.slideshare.net/masyrifahoo/jazmedia...)  
<1% - hasil estimasi juga menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan rasio pajak adalah non linier.  
<1% - [repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789...](http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789...)  
<1% - [tugaskampuss.blogspot.com/2012/04/download...](http://tugaskampuss.blogspot.com/2012/04/download...)  
<1% - [www.scribd.com/document/389200987/Desentralisasi...](http://www.scribd.com/document/389200987/Desentralisasi...)  
<1% - [link.springer.com/article/10.1007/BF00153397](http://link.springer.com/article/10.1007/BF00153397)  
<1% - [kangaminblog.blogspot.com/2012/10/pengantar...](http://kangaminblog.blogspot.com/2012/10/pengantar...)